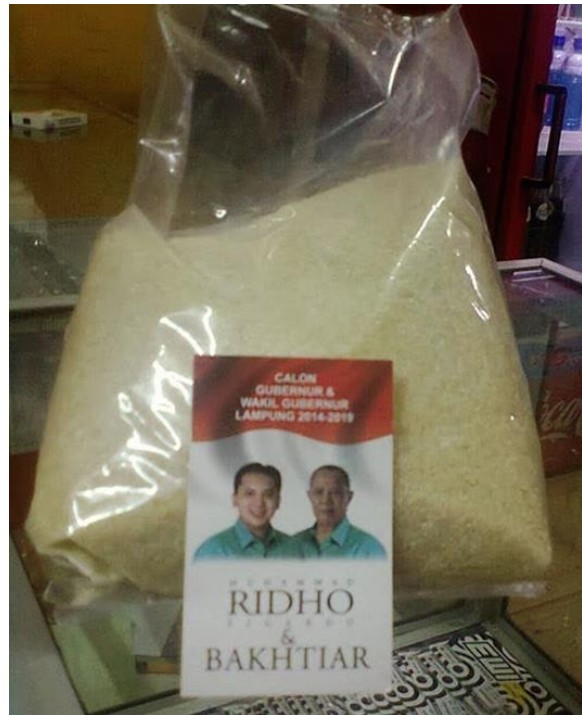




The Political Economy of Clientelism: Regional Disparities and Local Politics Across Indonesia

Ward Berenschot

Royal Netherlands Institute for Southeast Asian and Caribbean Studies
(KITLV). berenschot@kitlv.nl

Pertanyaan Pokok

- Seberapa umum politik transaksional terjadi di Indonesia?
- Apa penyebab terjadinya politik transaksional di Indonesia?

Politik transaksional = Klientelisme = Praktik transaksi/pertukaran bantuan pribadi untuk dukungan elektoral

Mengapa ini penting untuk mengulas hal ini?

- Politik transaksional menyebabkan meningkatnya kesenjangan politik dan mempertahankan dominansi oligarki di Indonesia (*lihat Winters 2014, Hadiz 2010, Hidayat 2007*)
- Politik transaksional menghabiskan uang dalam jumlah besar, yang meningkatkan korupsi (*lihat Aspinall & Sukmajati 2016*)
- Politik transaksional merusak tatanan pemerintahan dan memperlemah penyediaan layanan publik (*lihat World Bank 2017*)
- Politik transaksional memperlemah partai politik (*lihat Mietzner 2013*)

Metode Penelitian: Survei Ahli (Expert Survey) terkait dengan Kampanye Pemilu

- Survei terhadap 531 ahli di 38 Kabupaten di 16 provinsi di Indonesia terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilu, membandingkan karakteristik dan tingkat informal politik klientelisme di penjuru Indonesia
- 14 ahli di setiap kabupaten yang secara profesional memantau politik lokal: wartawan, akademisi, aktivis LSM dan penyenggara kampanye politik
- Menggunakan jaringan peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di hampir setiap provinsi peneliti lokal mensurvei 3 (tiga) kabupaten, 2 ibukota provinsi (kota) dan dua kabupaten
- Dilengkapi dengan kerja lapangan/etnografi (*ethnographic fieldwork*) terkait dengan kampanye pemilu di Lampung Utara (Sumatera), Kota Tangerang (Jawa) dan Gunung Mas (Kalimantan)



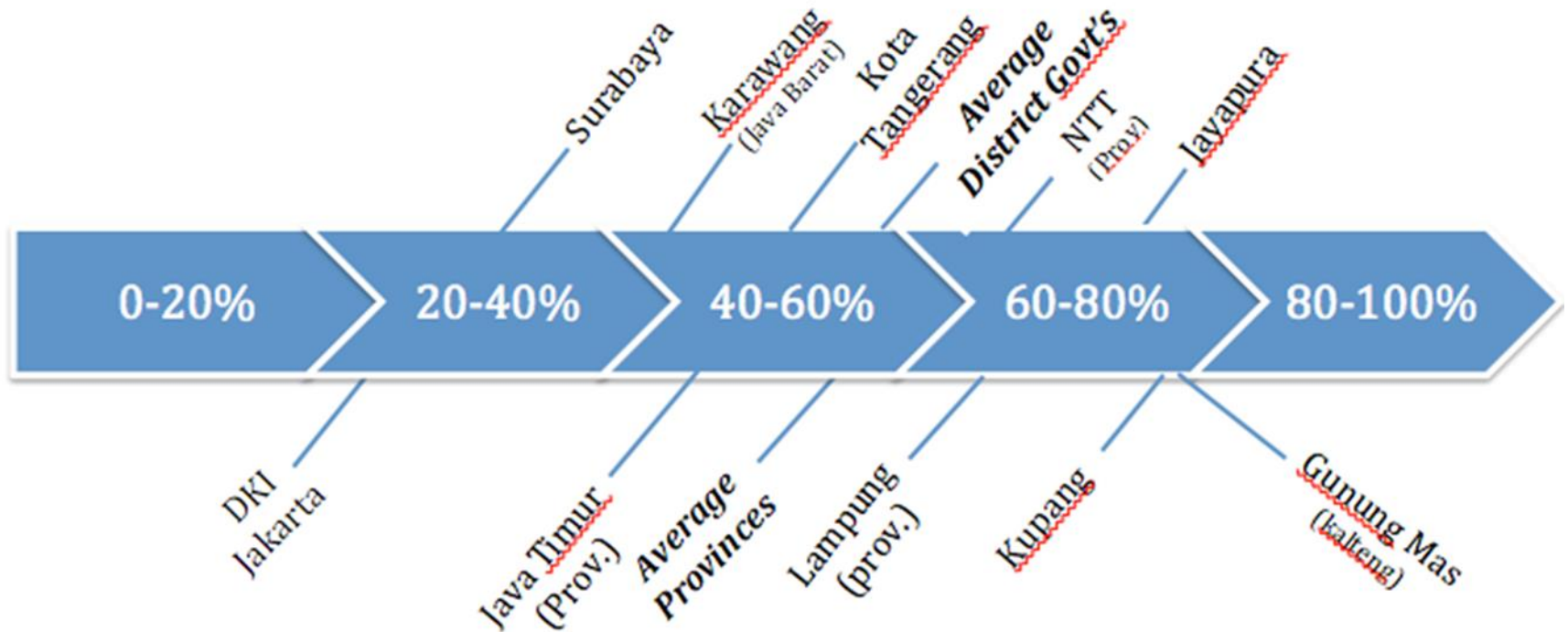
Sejauhmana tingkat transaksional di politik lokal?

Dari semua kontrak kerja utama yang dialokasikan kepada pemerintah Kabupaten, berapa persen yang diberikan kepada perusahaan atau bisnis yang mendukung kampanye pemilihan politisi yang berkuasa selama pilkada?



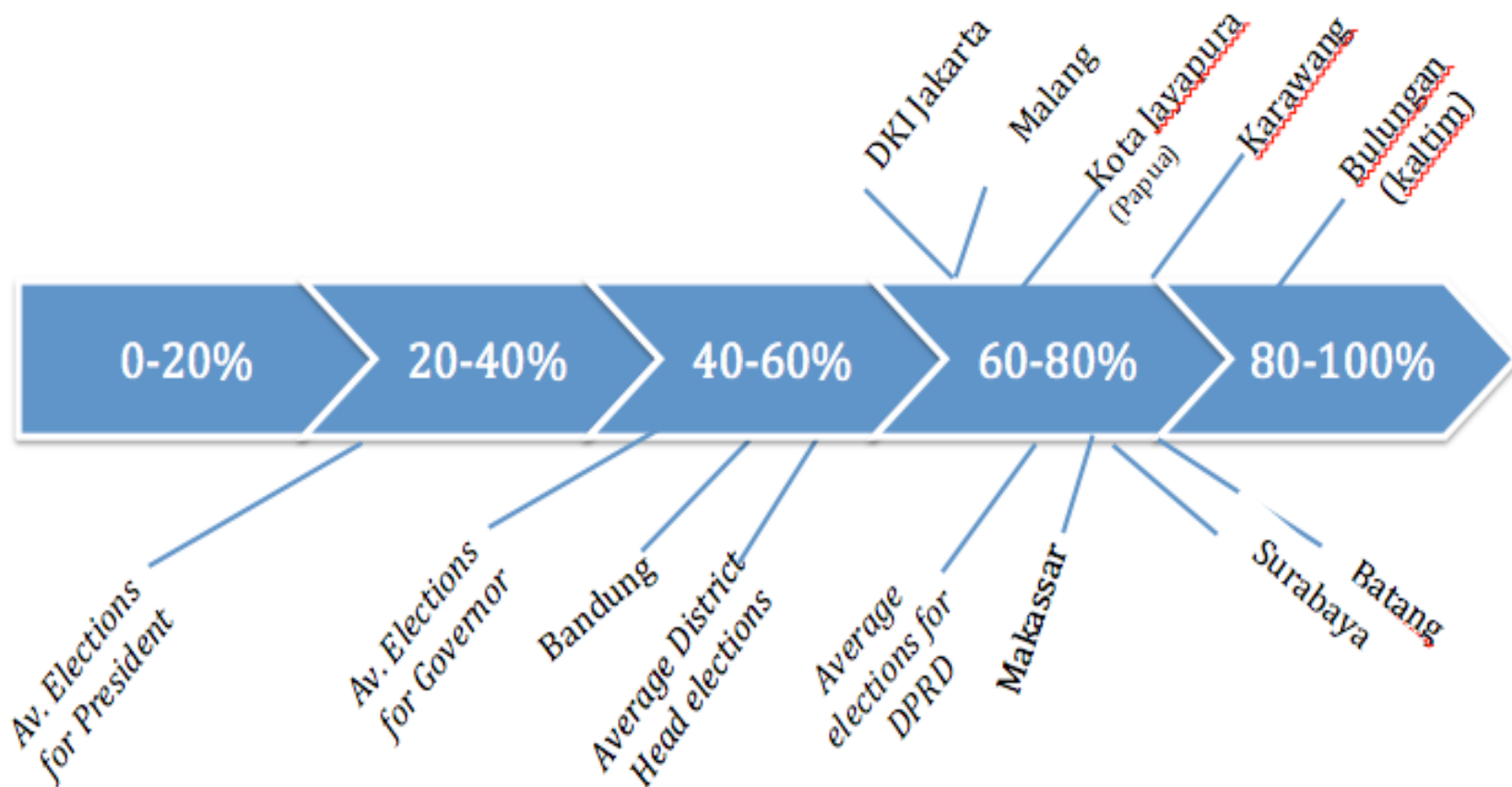
Birokrasi yang dipolitisasi?

Berapa persen dari pegawai negeri sipil dari pemerintah kabupaten (dengan jabatan tinggi) yang telah dipromosikan ke pos ini sebagai balasan atas dukungan secara terbuka atau diam-diam – terhadap seorang kandidat selama pilkada berlangsung?

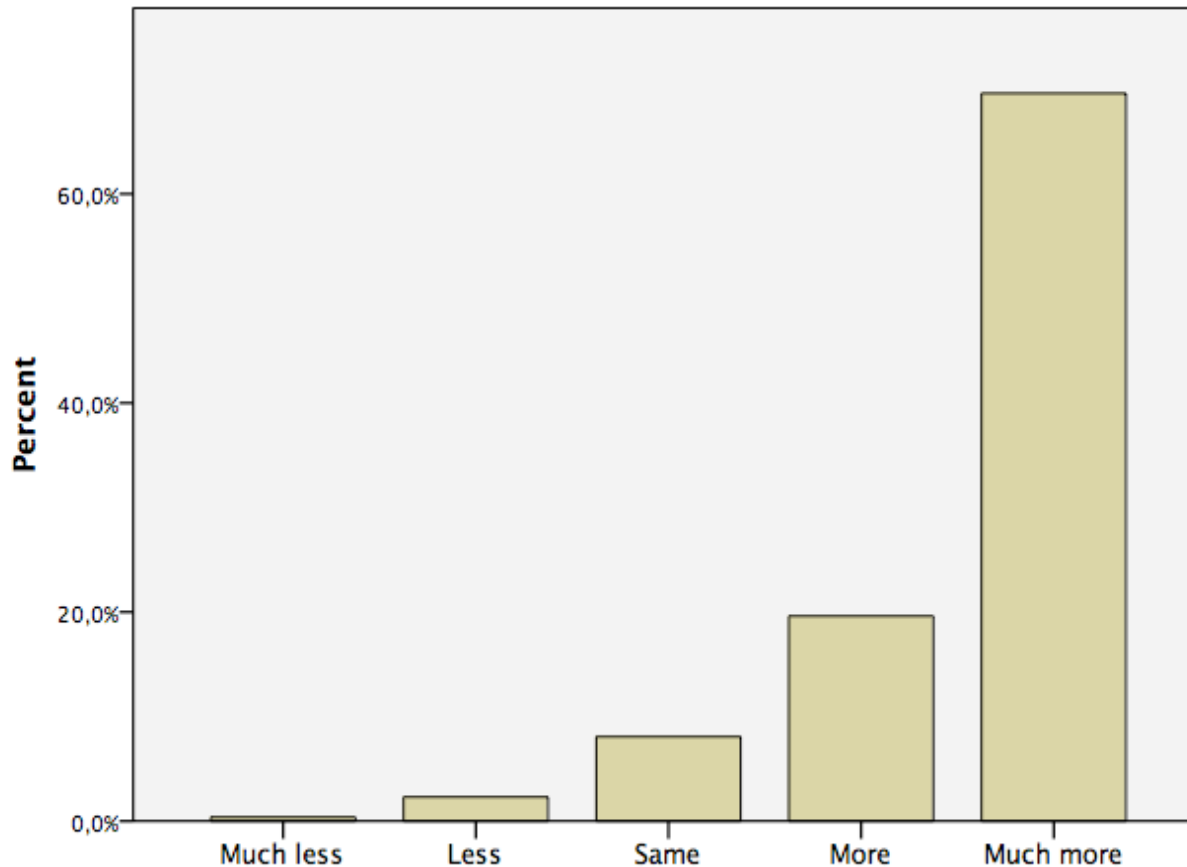


Pembelian Suara: Praktiknya Meluas di Pemilu Daerah

Berapa persentase pemilih yang diberikan uang atau barang-barang konsumsi selama pemilihan untuk dewan legislatif?



Pembelian Suara Telah Menjadi Hal Yang Umum Dilakukan



Compared to the first direct elections in 2005, do politicians in your province nowadays hand out more, less or the same amount of money during election campaigns to attract votes?



Dibandingkan dengan pemilihan langsung pertama pada tahun 2005, apakah politisi di provinsi Anda saat ini membagikan lebih banyak, lebih sedikit atau jumlah uang yang sama, selama kampanye pemilu untuk menarik pemilih?

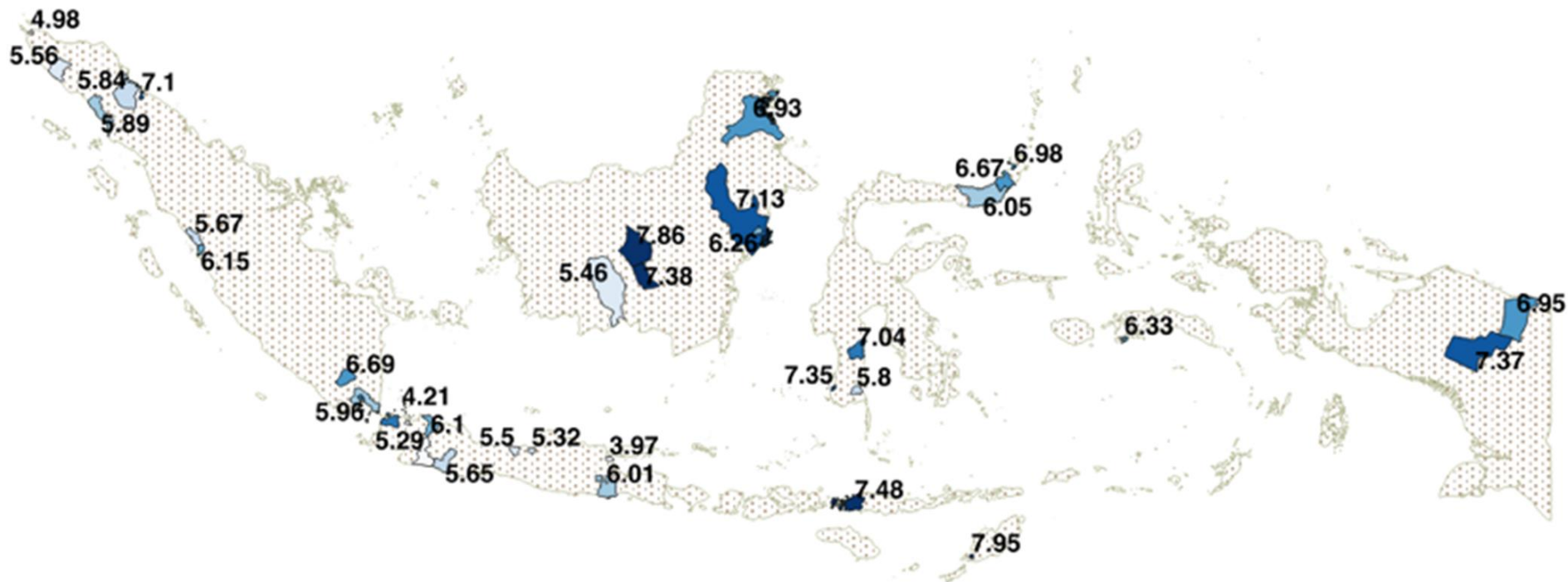
Clientelism Perception Index

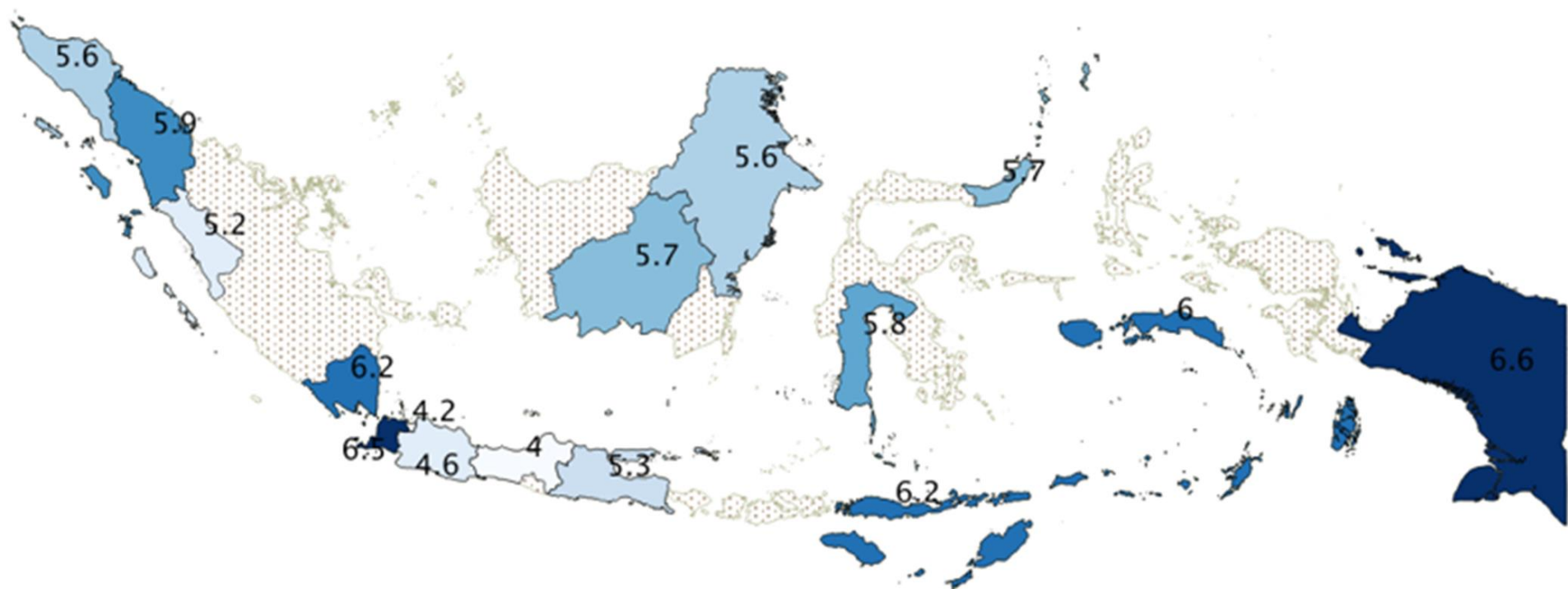
(Index Persepsi Klientelisme)

(Mengacu pada Kitschelt 2009, 2012)

- Proyek pemerintah (untuk membangun jalan, penyediaan barang, dsb)
- Pekerjaan
- Layanan umum (pengutamaan akses terhadap air, pendidikan, sanitasi, listrik, dsb)
- Akses terhadap program kesejahteraan sosial
- Penggunaan dana bantuan sosial (dana hibah/bansos)
- Kemudahan administrasi (lisensi dan surat izin)
- Uang (pembelian suara)

Hasil: Derajat Politik Transaksional (Klientelisme) di seluruh Indonesia

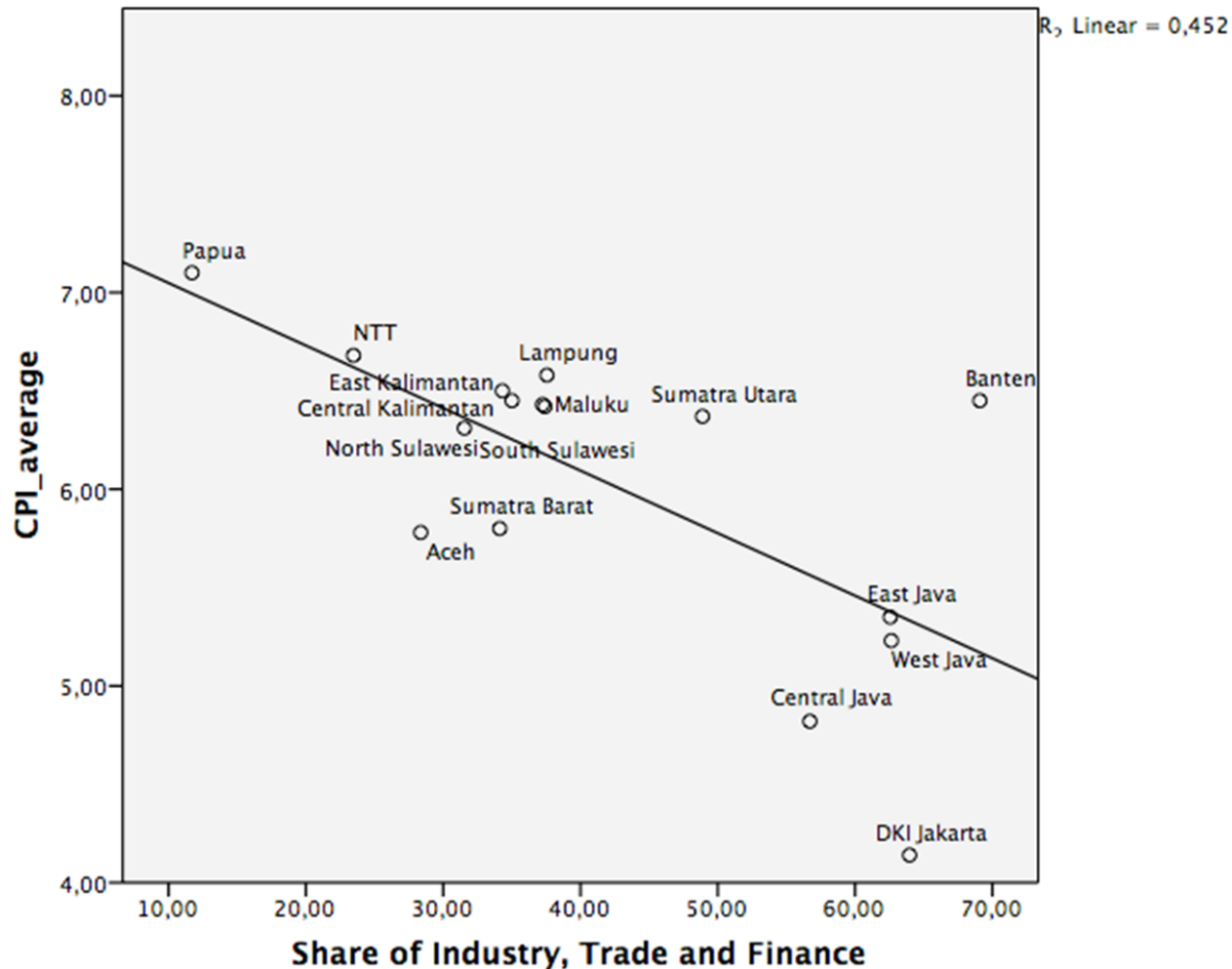




Politik Transaksional: Hubungan/Korelasi

	CPI (district)
Household Expenditure	-0,133
Poverty Rate	0,218
Years of Schooling	-0,058
City	-0,096
Industry jobs, share of total	-,517**
Ratio civil servants / private sector jobs	-,606**
Relative Size Industry, Trade, Finance sector	-,405*
Government Expenditure	-,406*
Ethnic Diversity	,384*
Indirect Rule in 1909	,502**
N	38

Ekonomi yang lebih beragam = lebih sedikit praktik politik transaksional



Electoral reform is needed

- Biaya tinggi yang terkait dengan politik transaksional sangat perlu dibatasi, karena ini akan menyebabkan praktik korupsi, politik oligarkis dan tatanan pemerintahan yang lemah
- Politik Transaksional bisa dikurangi dengan reformasi pemilu yang cerdas untuk mengubah *Incentive Structure* yang dihadapi oleh politisi
- Misalnya:
 - dengan mengubah open list system partai (untuk pemilihan parlemen),
 - memperkuat pengawasan kampanye,
 - mengintegrasikan pemilihan parlemen dan pemilihan kepala daerah

Kesimpulan

- Praktik politik transaksional meluas di seluruh Indonesia, dengan variasi di tingkat regional
- Dibutuhkan reformasi pemilu yang cerdas, misalnya dengan mengubah daftar terbuka partai (untuk pemilihan parlemen), memperkuat pengawasan kampanye, mengintegrasikan pemilihan parlemen dan pemilihan kepala daerah
- Para ilmuwan politik dan pembuat kebijakan perlu berkolaborasi untuk mengembangkan proposal Bersama
- Forthcoming book: Edward Aspinall & Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia* (Cornell University Press, early 2019)
- Versie Bahasa Indonesia: *Demokrasi Wani Piro* (Obor, November 2018)